

**Dari 21 ke 27:
Kajian Historis-Politik atas Perubahan Komposisi PPKI dalam Konteks
Konsensus Nasional**

**From 21 to 27:
*A Historical-Political Study of the Changes in the Composition of the PPKI in the Context of
National Consensus***

Dewa Made Alit

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Jl. Seroja, No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239)
Pos-el: dewaalit@mahadewa.ac.id

Abstrak. Perubahan jumlah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi 27 orang anggota tahun 1945 berdampak signifikan dalam politik dan sejarah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perubahan keanggotaan PPKI, serta implikasinya terhadap konstruksi legitimasi negara yang baru didirikan. Dengan menggunakan metode historis dan menggunakan sumber orde kedua, disimpulkan bahwa perubahan keanggotaan memiliki latar belakang sosiologis, historis dan ideologis. Perubahan ini membantu memperkuat legitimasi pemerintahan Indonesia yang baru dan mengembangkan dasar kebijakan yang lebih inklusif. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya mengetahui proses dinamis yang terlibat dalam pembangunan lembaga negara, yang menunjukkan bagaimana pilihan strategis mempengaruhi evolusi identitas dan struktur politik Indonesia setelah kemerdekaan.

Kata Kunci : PPKI, Penambahan Anggota, Konsesus Nasional

Abstract. *The change in the number of members of the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) to 27 members in 1945 had a significant impact on Indonesian politics and history. The purpose of this study is to examine the changes in PPKI membership, and their implications for the construction of the legitimacy of the newly established state. Using historical methods and using second-order sources, it is concluded that the changes in membership have sociological, historical and ideological backgrounds. These changes helped strengthen the legitimacy of the new Indonesian government and develop a more inclusive policy basis. The implication of this study is the importance of understanding the dynamic processes involved in the development of state institutions, which show how strategic choices influence the evolution of Indonesian political identity and structure after independence.*

Keywords: *PPKI, Member Addition, National Consensus*

PENDAHULUAN

Adanya konsensus nasional yang melibatkan berbagai kelompok etnis, politik, dan ideologi yang ada saat menjelang proklamasi kemerdekaan, membuat komposisi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berubah dari 21 menjadi 27 anggota, yang mencerminkan dinamika politik yang

kompleks pada periode menjelang deklarasi kemerdekaan Indonesia (Syarif, 2016). Hal ini terjadi karena pada pertengahan abad ke-20, masyarakat Indonesia mengalami perubahan karena berbagai kepentingan mulai bersatu dalam upaya membebaskan negara dari kekuasaan kolonial. Untuk mencerminkan aspirasi pemerintahan yang adil dan

demokratis, PPKI seharusnya mewakili semua fraksi. Namun, perubahan keanggotaannya membawa serta serangkaian kesulitan tersendiri dan sering kali mewakili konflik dan konsesi antar elit politik dan keinginan rakyat (Brata & Wartha, 2017; Faisal, 2018)

Gagasan tentang konsensus nasional, menggambarkan bagaimana kepentingan yang berbeda dapat terlibat dalam dialog dan konfrontasi untuk menghasilkan umpan balik positif bagi konflik politik yang sedang berlangsung (Arakawa & Bader, 2022). Lebih jauh, mengingat pluralisme Indonesia, konsep representasi dan inklusi dalam pengambilan keputusan merupakan konsep penting yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, kajian sejarah politik dalam kaitannya dengan PPKI akan menyoroti betapa pentingnya latar belakang sosial dan budaya dalam membentuk proses pembangunan konsensus. Selain itu, perubahan komposisi ini patut dipertimbangkan sebagai langkah adaptasi terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh posisi diplomatik Indonesia yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Gagasan mendasar ini menjelaskan interaksi antara politik lokal dan global yang membentuk kerangka PPKI dan cara-cara di mana hal ini membentuk identitas nasional yang baru. Melalui kajian ini, kami juga akan membahas aspek-aspek diplomasi politik di antara berbagai anggota PPKI, yang menunjukkan bagaimana posisi strategis masing-masing anggota dapat berkontribusi untuk mencapai konsensus.

Beberapa penelitian yang menganalisis PPKI dan relevansinya dalam konteks historis kemerdekaan Indonesia seperti Peranan Bpupki Dan PPKI Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia (Heri Rohayuningsih, 2009),

Orang Tionghoa Dalam Negara Indonesia Yang Dibayangkan: Analisis Percakapan Para Pendiri Bangsa Dalam Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI, (Dawa, 2009), namun sejumlah kecil penelitian ilmiah yang secara khusus mengeksplorasi perubahan dalam susunan anggota PPKI dan implikasinya terhadap konsensus nasional. Penelitian akan menyoroti dinamika politik yang terkait dengan transisi dari 21 menjadi 27 anggota, dengan menekankan bagaimana dinamika ini menggarisbawahi keharusan untuk meningkatkan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menempatkan wacana politik Indonesia dalam kerangka konstruksi teoritis kontemporer mengenai representasi dan konsensus, akan memberikan perspektif baru yang memiliki arti penting bagi studi akademis politik Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menyajikan kerangka interdisipliner yang mengintegrasikan sejarah politik, sosiologi, dan teori konsensus untuk memberikan pemahaman holistik tentang evolusi PPKI. Melalui pemeriksaan sumber-sumber primer dan sekunder dan penerapan metodologi inovatif, kami berusaha untuk mengisi kekosongan yang ada dalam wacana akademis, sehingga memberikan kontribusi substansial bagi bidang sejarah politik Indonesia. Selain itu untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang evolusi PPKI, penelitian ini juga menyajikan metode interdisipliner yang memadukan sejarah politik, sosiologi, dan teori konsensus. Diharapkan akan mampu menutup kesenjangan dalam literatur dengan meneliti sumber-sumber primer dan sekunder serta menerapkan pendekatan baru, sehingga secara signifikan memajukan studi sejarah politik Indonesia.

Sangatlah penting untuk memahami pilihan-pilihan politik ini dan implikasinya

terhadap legitimasi negara dan konsensus politik di masa-masa awal kemerdekaan, karena elemen-elemen ini dapat memengaruhi perkembangan identitas nasional dan kebijakan publik kontemporer. Minat ilmiah dalam studi tentang perubahan komposisi PPKI sangat kuat dalam sejarah politik Indonesia, khususnya dalam menunjukkan bagaimana para elit mencapai konsensus melalui kompromi dan negosiasi. Dengan meneliti alasan di balik pilihan politik ini, dampaknya terhadap legitimasi negara, dan penerapannya untuk memahami konsensus politik di awal kemerdekaan, kajian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang melatarbelakangi keputusan perubahan keanggotaan PPKI dan dampaknya terhadap legitimasi dari negara yang baru didirikan. Kajian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesulitan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam menjaga keberagaman dan inklusivitas. Penelitian ini juga akan memajukan pemahaman kita tentang representasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan sosial.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami variasi komposisi PPKI dalam kerangka konsensus nasional, penelitian ini menggabungkan pendekatan historis dengan metode kualitatif berdasarkan analisis sumber sekunder (Madjid, 2021). Untuk menjamin validitas hasil, empat fase penelitian historis—historiografi, interpretasi, kritik, dan heuristik—diterapkan secara metodis. Untuk mengumpulkan konteks teoritis, heuristik diterapkan dengan melacak sumber-sumber sekunder, termasuk buku, artikel jurnal, dan penelitian ilmiah. Kritik sumber mencakup evaluasi internal dan eksternal untuk menentukan

ketergantungan konten dan validitas dokumen. Untuk memahami motivasi Soekarno untuk menambahkan enam anggota PPKI dan konsekuensi politik dari keputusan ini, interpretasi data menggunakan analisis wacana historis dan pendekatan politik konsensus. Kemudian historiografi disusun dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sehingga perubahan keanggotaan PPKI dapat ditempatkan dalam perdebatan historiografi yang lebih luas tentang konsensus politik awal kemerdekaan Indonesia. Studi ini menekankan hubungan antara perubahan komposisi PPKI dan strategi elit nasional dalam membangun legitimasi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Penambahan Jumlah Anggota PPKI

Sebagai pemimpin revolusi dan penggerak utama kemerdekaan Indonesia, Sukarno memiliki rencana yang matang untuk menentukan arah struktur dan kebijakan negara. Menambah jumlah anggota PPKI merupakan salah satu pilihan pentingnya, dan mereka berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan pada tahun 1945. Unsur-unsur sosiologis, historis, dan teoritis yang membentuk keadaan di Indonesia saat itu terkait erat dengan pilihan ini.

A. Latar Belakang Sosiologis

Terdapat banyak suku, agama, dialek, dan budaya yang berbeda di Indonesia pada saat itu (Bahasa & Budaya, 2023; Islamiyah et al., 2024; Purwaningrum & Pangestu, 2021). Keadaan sosial ini berdampak pada bagaimana masyarakat diorganisasikan,

bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda berinteraksi, dan betapa sulitnya untuk membentuk persatuan nasional. “Masyarakat majemuk memiliki ancaman sosial-budaya berupa konflik sosial, insurgensi/separatisme hingga disintegrasi bangsa” (Nefo & Kertopati, 2025). Oleh karena itu, keputusan Sukarno untuk menambah anggota PPKI terkait erat dengan kompleksitas masyarakat Indonesia.

1. Keberagaman Etnik dan Sosial Indonesia

Dengan lebih dari 300 suku yang berbeda, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan struktur sosialnya sendiri, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman etnis, agama, dan budaya pada tahun 1945 maupun sekarang. Penduduknya juga menganut berbagai agama, seperti Buddha, Hindu, Islam, Kristen, dan kepercayaan adat (Paldi, 2017). Sulit untuk mendirikan pemerintahan yang dapat mewakili semua masyarakat karena keragaman ini. Sukarno melihat bahwa satu etnis atau agama tidak dapat menjadi dasar bagi Indonesia. Akibatnya, ia memilih orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan etnis dan memperluas keanggotaan PPKI (Rinardi, 2017). Tindakan ini dimaksudkan untuk mempromosikan persatuan, memastikan representasi yang adil, dan menghentikan beberapa kelompok dari mengendalikan pengambilan keputusan utama

2. Kepentingan dan Representasi berdasarkan Wilayah

Sebagai negara kepulauan besar dengan ribuan pulau yang tersebar di seluruh nusantara, Indonesia pada saat itu juga menghadapi tantangan dalam hal representasi daerah (Rinardi, 2017). Beberapa daerah, seperti Jawa dan Sumatera, lebih maju secara politik dan

ekonomi daripada daerah lain, seperti Papua, Kalimantan, atau Sulawesi (Jaya Zalukhu et al., 2021). Sukarno menyadari bahwa keragaman geografis ini harus tercermin dalam struktur pemerintahan yang akan dibentuk setelah kemerdekaan. Dalam hal ini, PPKI harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan daerah di samping mewakili kelompok etnis. Sukarno ingin mencegah Jawa, yang sudah lebih maju dan lebih kuat daripada daerah lain, dari mengendalikan keputusan politik, jadi dia memutuskan untuk menambah jumlah anggota PPKI sehingga perwakilan dari berbagai daerah dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang akan menentukan nasib Indonesia yang baru merdeka. Tujuan utamanya adalah untuk membangun rasa keadilan dan kesetaraan bagi semua daerah di Indonesia.

3. Menemukan Kesatuan Di Antara Perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika)

Pada tahun 1945, menyatukan berbagai golongan yang berbeda secara sosial, politik, dan ekonomi merupakan masalah yang signifikan bagi Indonesia. Sukarno menyampaikan gagasan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ideologi dasar untuk pembentukan negara baru (Riyanto et al., 2022). Gagasan ini perlu diimplementasikan dalam tindakan sosial dan politik; bukan sekadar simbol. Sukarno bertujuan untuk meningkatkan persatuan nasional dengan mengubah jumlah keanggotaan PPKI. Selain mengadvokasi kemerdekaan, PPKI berkembang untuk mewakili kohesi nasional (Riyanto et al., 2022). Sukarno ingin memastikan bahwa semangat solidaritas, solidaritas, dan kerja sama tercermin dalam keputusan-keputusan PPKI.

4. Fungsi Kelompok dan Kelas Sosial dalam Masyarakat

Indonesia harus berhadapan dengan kesenjangan kelas sosial selain perbedaan etnis dan geografis (Rinardi, 2017). Sebelum kemerdekaan, kaum priyayi (bangsawan) dan rakyat biasa (pekerja, petani, dan desa) masih merupakan bagian besar dari masyarakat (Kuntowijoyo, 2003). Kaum elit dan intelektual priyayi, yang memiliki akses lebih besar terhadap otoritas, awalnya mengendalikan PPKI yang didirikan Jepang (Niwandhono, 2014). Namun, Sukarno berusaha mengubah situasi ini, karena ia mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Tujuan penambahan jumlah anggota PPKI adalah untuk memberikan kesempatan kepada berbagai lapisan masyarakat untuk bersuara selain mewakili kelompok etnis dan daerah. Sukarno menyadari bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh kelompok sosial ekonomi rendah diperlukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, ia menambah jumlah anggota PPKI hingga mencakup petani, buruh, dan kelompok lain yang secara historis kurang terwakili dalam politik (Niwandhono, 2014).

5. Bersatu padu membangun nasionalisme

Di tengah kerusuhan sosial dan politik, Sukarno memastikan bahwa semua orang Indonesia terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, bukan hanya segelintir orang atau kaum elit (Jaya Zalukhu et al., 2021). Langkah yang diperhitungkan untuk mendorong keterlibatan nasional yang lebih luas dalam persiapan kemerdekaan adalah perluasan keanggotaan PPKI. Tujuan dari pilihan ini adalah untuk mendorong nasionalisme inklusif yang akan mengurangi ketegangan sosial dan menjembatani perpecahan.

Sukarno menekankan bahwa kemerdekaan dicapai melalui upaya gabungan semua kelompok masyarakat, bukan hanya kaum elit, dengan memperluas perwakilan di PPKI (Rinardi, 2017). Landasan bagi nasionalisme Indonesia yang inklusif dan kohesif akan diperkuat oleh PPKI yang lebih beragam.

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa gagasan Sukarno yang menganjurkan perubahan keanggotaan PPKI sangat dipengaruhi oleh berbagai unsur sosiologis yang pelik, seperti kelas sosial ekonomi, geografi, agama, keberagaman suku bangsa, dan sejarah pergerakan kemerdekaan. Sukarno menyadari bahwa bentuk lembaga negara seperti PPKI dan pemerintahan harus mewakili kepentingan dan keberagaman semua lapisan masyarakat agar dapat mencapai Indonesia yang merdeka dan bersatu. Selain sebagai langkah pragmatis menuju kemerdekaan, perluasan keanggotaan PPKI merupakan upaya untuk menyatukan dan mengintegrasikan berbagai bagian negara Indonesia.

B. Latar Belakang Sejarah

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, keanggotaan PPKI berfluktuasi, mencerminkan iklim sosial dan politik saat itu. Ketika Jepang pertama kali mendirikan PPKI, keanggotaannya sedikit dan didominasi oleh organisasi-organisasi pro-pemerintah. Namun, lanskap politik mengalami perubahan signifikan setelah pengumuman tersebut. Sukarno merestrukturisasi PPKI agar lebih mewakili ambisi bangsa dan semangat kebebasan. Mempersiapkan Indonesia untuk pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis merupakan tujuan lain dari reformasi ini (Sartono, 2009). Penting untuk mempertimbangkan kolonialisme,

pendudukan Jepang, dan interaksi berbagai kekuatan politik dan sosial dalam proses memperoleh kemerdekaan ketika menganalisis tujuan Sukarno untuk memperkuat legitimasi pemerintahan baru dan meletakkan dasar bagi negara berdaulat dengan memperluas jumlah anggota PPKI.

1. Kondisi Politik Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang.

Untuk mempertahankan kendali atas wilayah Indonesia, Jepang menerapkan sejumlah kebijakan selama pendudukannya di Indonesia pada tahun 1942–1945 (Sinaga et al., 2024). Namun, kebijakan-kebijakan ini juga memberi kesempatan kepada pejabat Indonesia untuk mengembangkan gagasan-gagasan tentang kemerdekaan (Gracela et al., 2023). Jepang pada awalnya bersifat represif, tetapi sebagai taktik untuk meningkatkan kekuasaannya di Asia Tenggara, Jepang akhirnya memberi ruang bagi gerakan kemerdekaan. Pada tahun 1945, Jepang mendirikan kelompok-kelompok seperti Jawa Hokokai dan BPUPKI sebagai sarana untuk meredam gerakan kemerdekaan. BPUPKI lebih berfungsi sebagai alat legitimasi Jepang meskipun didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan (Duma Lumban Gaol & Reka Seprina2, 2023). Namun, lanskap politik Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan kapitulasi kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945. Tokoh penting dalam konflik tersebut, Sukarno dan Hatta, segera memanfaatkan momentum tersebut untuk mendeklarasikan kemerdekaan.

2. PPKI Menuju Kemerdekaan

Dari sudut pandang sejarah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

mengubah keanggotaannya untuk menjamin keterlibatan yang lebih besar dalam proses persiapan kemerdekaan. PPKI didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945, ketika Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah dibubarkan. Tugas terpentingnya adalah untuk menyiapkan konstitusi, mengendalikan pembagian kekuasaan, dan membentuk pemerintahan.

Untuk membentuk PPKI, BPUPKI terlebih dahulu memilih 21 orang anggota karena keterbatasan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Sukarno kemudian menambah jumlah anggota menjadi 27 orang untuk meningkatkan representasi politik dan sosial ekonomi saat ia merencanakan pendirian negara. Selain mencerminkan dinamika politik internal, tindakan ini merupakan respons terhadap perubahan situasi geopolitik, khususnya kekalahan Jepang dan meningkatnya seruan untuk deklarasi kemerdekaan lebih awal. Lebih jauh, keterlibatan anggota PPKI dapat dianggap sebagai strategi praktis untuk mengatasi berbagai kelompok politik yang semakin kuat, seperti organisasi daerah, organisasi keagamaan, dan organisasi nasionalis. Dengan demikian, reformasi ini merupakan upaya mendamaikan berbagai kepentingan dalam rangka pembentukan negara merdeka baru, di samping bersifat administratif.

3. Kepentingan Politik dan Persaingan Internal

Sebelum proklamasi, banyak organisasi yang memiliki tujuan politik masing-masing (Joko Purnomo et al., 2023). Dalam budaya Indonesia, terdapat persaingan antara sejumlah faksi, seperti mereka yang mendukung filsafat nasionalis sekuler yang dipelopori Sukarno

dan Hatta dan yang lainnya yang berpegang pada keyakinan agama (Faisal, 2018) . Selain itu, elit yang terbiasa dengan struktur kekuasaan kolonial berdampak pada terciptanya sistem pemerintahan yang lebih luas dan inklusif.

Sukarno dan Hatta menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia yang baru saja diperoleh perlu mendorong persatuan meskipun ada persaingan politik internal yang intens (Attribution-noncommercial-noderivatives et al., 1949). Keanggotaan PPKI ditingkatkan menjadi badan yang lebih representatif dan lebih luas, yang mencakup kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terwakili dalam BPUPKI yang relatif kecil. Hal ini dilakukan untuk membuat pengambilan keputusan lebih inklusif dan melibatkan berbagai elemen negara, baik berdasarkan suku bangsa, agama, atau kelompok sosial lainnya.

4. Keinginan untuk Memperkuat Posisi Indonesia di Mata Dunia Internasional

Memperkuat kredibilitas internasional Indonesia sebagai negara merdeka merupakan salah satu elemen kunci yang mendorong perubahan jumlah keanggotaan PPKI. Sukarno memahami bahwa meskipun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih perlu menunjukkan bahwa negara tersebut dapat dijalankan secara efektif dan bahwa semua kelompok masyarakat terlibat dalam proses pembentukan negara baru tersebut agar dapat berhasil di kancah internasional. Upaya untuk membangun konsensus politik yang lebih luas di dalam negeri juga terkait dengan peningkatan jumlah keanggotaan PPKI. Sukarno dan Hatta berupaya keras untuk memastikan bahwa deklarasi kemerdekaan Indonesia

merupakan hasil diskusi dengan seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya keputusan segelintir orang atau organisasi (Lindblad, 2021). Inilah alasan usulan untuk merestrukturisasi PPKI agar lebih inklusif dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang akan dijunjung tinggi oleh negara yang baru saja merdeka ini.

5. Pembentukan Undang-Undang Dasar dan Negara Baru

Salah satu tugas utama PPKI adalah merancang Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menjadi landasan hukum bagi Indonesia yang merdeka. Tugas ini termasuk mengubah keanggotaan organisasi (Attribution-noncommercial-noderivatives et al., 1949). Ketika Sukarno dan Hatta menyusun Undang-Undang Dasar, mereka bermaksud memastikan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut mencerminkan tujuan berbagai kelompok di Indonesia (Fauziyah et al., 2022). Mereka bertujuan untuk meningkatkan representasi negara dari berbagai kepentingan sosial ekonomi, politik, dan budaya dengan memperluas keanggotaan PPKI. Misalnya, dengan adanya perwakilan dari beberapa agama dan suku bangsa di PPKI, kemungkinan terjadinya ketidakadilan atau diskriminasi dapat dikurangi ketika UUD disusun. Sukarno berupaya untuk mencapai kompromi antara sejumlah pihak yang memiliki agenda yang berbeda, seperti organisasi nasionalis yang menghargai sekularisme dan organisasi Islam yang saat itu sangat menonjol.

Dengan memperbanyak jumlah anggota PPKI, mereka berusaha untuk lebih mencerminkan berbagai kepentingan sosial ekonomi, politik, dan budaya di negara ini. Misalnya, ketika Undang-Undang Dasar sedang disusun, kemungkinan terjadinya ketidakadilan atau

prasangka dapat dikurangi dengan mengikutsertakan perwakilan dari berbagai agama dan kelompok etnis dalam PPKI. Sukarno berupaya untuk menengahi pertikaian antara banyak kelompok dengan tujuan yang berbeda, termasuk organisasi-organisasi Islam yang cukup terkenal pada saat itu dan kelompok-kelompok nasionalis yang lebih menyukai sekularisme

6. Pentingnya Dukungan Militer dan Pemerintahan Jepang

Perubahan jumlah anggota PPKI juga dipengaruhi oleh lingkungan militer dan politik dunia saat itu (Rinardi, 2017). Ketika PPKI berdiri, Jepang yang sebelumnya sangat kuat kedudukannya di Indonesia, sedang mengalami kemunduran menyusul kealahannya dalam Perang Dunia II. Bahkan Jepang menentang kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan atau pengaruh asing. Oleh karena itu, Sukarno dan Hatta memandang PPKI, organisasi yang dibentuk Jepang, sebagai kesempatan untuk kembali mengendalikan proses kemerdekaan dan membangun struktur politik yang lebih mandiri (Lu, 2024).

Lingkungan politik pada masa pendudukan Jepang, kebutuhan untuk memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka di mata dunia, dan upaya untuk mengakomodasi berbagai kelompok sosial dan politik di dalam negeri, semuanya berdampak pada usulan Sukarno untuk mengubah jumlah anggota PPKI. Langkah yang disengaja untuk memperluas keanggotaan organisasi, mewakili organisasi tambahan, dan memberikan negara Indonesia yang baru terbentuk basis yang lebih kuat adalah dengan menambah keanggotaan PPKI. Dalam konteks sejarah Indonesia, tindakan ini mewujudkan semangat kerja sama dan

solidaritas yang menjadi landasan negara Indonesia yang merdeka (Kingsbury, 2012).

C. Latar Belakang Ideologis

Pemikiran Sukarno sangat bergantung pada latar belakang ideologisnya (Hasanah & Aan Budianto, 2020). Dalam konteks nasionalisme, politik, dan pembentukan negara Indonesia baru, gagasan Sukarno tidak dapat dilepaskan dari falsafah besar yang dipelajarinya (Kusman, 2022). Keputusan untuk menambah keanggotaan PPKI, yang pada akhirnya menjadi dasar pembentukan negara Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila, sangat dipengaruhi oleh falsafah ini.

1. Ideologi Nasionalisme Indonesia dan Sukarno

Berbicara tentang nasionalisme Indonesia, berbicara tentang nasionalisme nasional atau nasionalisme integratif. Nasionalisme ini sangat menekankan persatuan masyarakat Indonesia yang beragam dalam hal suku, agama, dan budaya (Lay, 2006). Sukarno melihat perlunya identitas nasional yang dapat menyatukan keragaman tersebut untuk mendirikan negara Indonesia yang otonom (Hasanah & Aan Budianto, 2020).

Nasionalisme Sukarno memiliki akar ideologis yang dalam, dalam perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, khususnya anti-kolonialisme dan anti-imperialisme (Kusman, 2022; Lockard, 2009; Meng & Silva, 2022; Stutje, 2016). Meskipun ia lebih menekankan pentingnya kebangkitan nasional peningkatan kesadaran hak-hak rakyat untuk merdeka ia sangat dipengaruhi oleh intelektual global seperti Karl Marx, Mahatma Gandhi, dan Sun

Yat-sen (Anderson, 2001; Suyanto, 2011). Sukarno melihat bahwa membangun negara yang merdeka memerlukan keterlibatan semua aspek negara dan menumbuhkan rasa persatuan yang dapat mengatasi perpecahan sosial ekonomi. Oleh karena itu, filosofi nasionalisme yang inklusif berdampak signifikan pada pergeseran keanggotaan PPKI dari 21 menjadi 27. Untuk mencegah dominasi kelompok tertentu, Sukarno berusaha menjamin bahwa perwakilan dari berbagai kelas sosial, agama, dan kebangsaan memiliki suara dalam pembentukan negara (Octavian & Dianti, 2023; Yufriadi et al., 2023)

Perubahan keanggotaan PPKI menjadi representasi semangat persatuan dalam keberagaman dalam kerangka ideologi tersebut. Meskipun terdapat banyak kelompok suku dan agama yang berbeda di Indonesia, diharapkan PPKI akan mencerminkan keberagaman tersebut dan menjamin bahwa semua pihak merasa dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kemerdekaan.

2. Ideologi Pancasila sebagai Landasan Negara

Pemikiran Sukarno sangat dipengaruhi oleh Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia, terutama dalam hal pembentukan negara merdeka (Razuni & Nasional, 2024); (Razuni, 2023) (Wirasena et al., 2023). Pancasila adalah filsafat hidup yang mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan dimaksudkan untuk menyatukan semua aspek negara yang dipisahkan oleh perbedaan. Pancasila bukan sekadar semboyan atau landasan hukum. Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di antara lima sila Pancasila (Pulhehe & Robandi, 2024). Sebagai filsafat sinkretis yang menggabungkan berbagai aliran intelektual, Sukarno menjadikan Pancasila untuk melayani berbagai kepentingan sosial, agama, dan budaya Indonesia.

Sukarno menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis ketika ia menciptakan struktur negara Indonesia yang baru. Sukarno berpendapat bahwa PPKI harus mewakili kemajemukan dan keberagaman masyarakat Indonesia dalam hal wilayah, agama, dan suku bangsa agar dapat melaksanakan cita-cita Pancasila secara efektif. Dengan demikian, penambahan jumlah anggota PPKI dapat dipandang sebagai langkah menuju terbentuknya organisasi yang lebih inklusif dan representatif yang dapat mengembangkan dasar negara yang dapat mempertimbangkan kepentingan semua lapisan masyarakat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Sukarno menambah jumlah anggota PPKI dengan tujuan mencegah satu kelompok atau golongan tertentu mengendalikan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) maupun kerangka organisasi pemerintahan Indonesia. Sukarno sangat menyadari bahwa berbagai kelompok di Indonesia perlu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan negara untuk mencapai keadilan sosial, sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima Pancasila.

3. Ideologi Demokrasi dan Musyawarah

Filsafat Sukarno berakar kuat dalam sejumlah ideologi, termasuk Pancasila dan demokrasi (Razuni & Nasional, 2024). Sukarno percaya bahwa pendekatan terbaik untuk menjalankan negara yang baru saja merdeka adalah dengan

menerapkan demokrasi yang didasarkan pada diskusi dan pembangunan konsensus. Ia menggarisbawahi betapa pentingnya setiap orang Indonesia berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib bangsa.

Alasan Sukarno mengubah jumlah anggota PPKI dapat dipahami dengan menerapkan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas (Asy'ari Muthhar, 2016). Habermas menekankan bahwa proses demokrasi yang sehat harus didasarkan pada diskusi dan musyawarah terbuka antara berbagai pihak dengan pendapat dan kepentingan yang berbeda. Sukarno ingin memastikan bahwa PPKI, sebagai badan yang merumuskan kemerdekaan Indonesia, dapat menjadi ruang untuk diskusi politik yang sehat dan konstruktif yang melibatkan tidak hanya beberapa orang terpilih tetapi semua elemen masyarakat yang memiliki aspirasi untuk kemerdekaan Indonesia.

Sukarno memahami bahwa representasi politik yang lebih besar diperlukan agar PPKI dapat beroperasi secara efektif. Pergeseran jumlah anggota PPKI merupakan cara bagi ideologi demokrasi untuk mengakui hak semua kelompok sosial untuk terlibat dalam memilih arah negara baru. Sukarno bermaksud memastikan bahwa anggota PPKI berasal dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok agama, etnis, dan daerah, selain dari elit nasionalis.

4. Ideologi Sosialisme Indonesia

Kerangka konseptual Sukarno dibentuk secara signifikan oleh sosialisme yang berkembang pesat di Indonesia pada masa itu, khususnya berkenaan dengan inisiatif yang bertujuan untuk membangun negara yang makmur dan berkeadilan. Sukarno berpendapat bahwa gagasan kemerdekaan Indonesia tidak hanya

mencakup pembebasan politik tetapi juga penentuan nasib sendiri secara sosial dan ekonomi (Meliala & Woods, 2022). Masyarakat yang terpinggirkan secara negatif dipengaruhi oleh rezim ekonomi eksploitatif kolonialisme, dan ia bercita-cita untuk membangun kerangka ekonomi yang akan memberdayakan mereka. Ideologi Sukarno tidak dibatasi oleh paradigma sosialis yang dilembagakan oleh Tiongkok atau Uni Soviet; sebaliknya, ia menganjurkan perwujudan sosialisme yang lebih demokratis (Mat Yazid, 2016). Ia menggarisbawahi konsep "sosialisme gotong royong," yang memprioritaskan prinsip-prinsip persatuan, solidaritas sosial, dan distribusi ekonomi yang adil di antara semua warga negara Indonesia (Fadhli et al., 2023; Pratama et al., 2022).

Sukarno berpendapat bahwa untuk mendirikan negara yang selaras dengan rakyat, penting untuk memasukkan perwakilan dari kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan ke dalam lembaga-lembaga pembentuk negara seperti PPKI. Sukarno berpendapat bahwa perlunya memasukkan perspektif kelompok-kelompok yang secara historis signifikan ke dalam PPKI berdasarkan kebutuhan akan pertimbangan sosial yang lebih luas dalam proses politik. Keterlibatan ini sangat penting untuk menciptakan negara yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan keinginan rakyatnya. Partisipasi dan representasi politik dapat ditingkatkan dengan memasukkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti masyarakat minoritas dan masyarakat adat, yang sering kali terhalang oleh tantangan struktural dan ekonomi. Hambatan-hambatan ini mengurangi kesejahteraan sosial-politik mereka dan menghambat kemajuan mereka dalam berbagai proses

pengambilan keputusan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Untuk menjamin bahwa upaya membangun negara Indonesia yang baru didirikan menghasilkan resolusi-resolusi yang memihak rakyat banyak dan bukan hanya golongan-golongan elit tertentu, susunan anggota PPKI mengalami modifikasi (Indrayani et al., 2020). Sesuai dengan prinsip-prinsip sosialis, perubahan susunan anggota PPKI dapat diartikan sebagai inisiatif untuk menyebarluaskan otoritas politik di antara kelompok-kelompok yang lebih luas, sehingga mengurangi risiko kelompok tertentu memonopoli lanskap politik (Hindley, 1962).

5. Keberagaman Agama dan Ideologi Negara

Perlu diingat bahwa landasan ideologis Sukarno mencakup perhatian terhadap pluralisme agama di Indonesia. Sukarno bersikeras menjaga keharmonisan antara agama dan negara dengan mencegah satu agama atau komunitas agama mengendalikan pembentukan negara (Formichi, 2021). Sukarno mengakui pentingnya agama dalam masyarakat Indonesia meskipun ia dikenal sebagai seorang nasionalis sekuler.

Berdasarkan penjelasan di atas, alasan ideologis Sukarno untuk mengubah jumlah anggota PPKI sangat dipengaruhi oleh Pancasila, nasionalisme inklusif, demokrasi deliberatif, sosialisme gotong royong, dan aspirasi untuk mendirikan negara yang adil dan merdeka (Kusman, 2022). Sukarno berusaha menjamin bahwa Indonesia yang baru merdeka dibangun di atas ideologi yang dapat merangkul semua aspek negara, dari berbagai agama, suku,

dan latar belakang sosial, dengan memperluas jumlah anggota PPKI. Akibatnya, perubahan keanggotaan PPKI merupakan respons praktis terhadap iklim politik saat itu dan demonstrasi cita-cita luhur yang menjadi landasan negara Indonesia yang baru.

Oleh karena itu, Sukarno memahami pentingnya pembentukan suatu badan yang dapat mewakili keberagaman Indonesia agar keputusan yang diambil dapat disetujui oleh berbagai lapisan masyarakat. Karena Sukarno harus memberikan representasi yang adil bagi berbagai kelompok etnis, agama, dan daerah di Indonesia, keberagaman ini menjadi perhatiannya ketika memutuskan siapa yang harus menjadi anggota PPKI (Indrayani et al., 2020). Upaya Sukarno untuk menjadikan PPKI lebih representatif ditunjukkan dengan perubahan jumlah anggota organisasi yang semula dimaksudkan lebih sedikit (Hindley, 1962). Dalam hal ini, Sukarno memandang PPKI sebagai wadah yang mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, selain sebagai wadah penyusunan kemerdekaan. Sukarno berupaya mengakomodasi lebih banyak kepentingan dan menghindari dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain dengan memperluas jumlah anggota PPKI.

Implikasinya Terhadap Konstruksi Legitimasi Negara

Legitimasi negara Indonesia yang baru merdeka sangat dipengaruhi oleh pilihan strategis untuk menambah jumlah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dari 21 menjadi 27 orang (Fauziyah et al., 2022). Melalui representasi yang lebih inklusif, keenam anggota PPKI yang baru yang sebagian besar berasal dari luar Jawa membantu

memperkuat kredibilitas nasional (Razuni, 2024) karena *“The agency called PPKI is composed of well-known leaders and people from and who represent regions of Indonesia. The agency is therefore considered a Representative Body that represents all the people of Indonesia”* (Gunawan et al., 2020). Selain itu, hal ini mengurangi kemungkinan delegitimasi yang disebabkan oleh dominasi Jawa selama proses pembentukan negara (Indrayani et al., 2020). Pergeseran komposisi PPKI memainkan peran penting dalam menciptakan basis yang lebih luas dan tahan lama bagi legitimasi politik Indonesia.

Jepang pertama kali mendirikan PPKI sebagai organisasi yang bertugas mempersiapkan Indonesia untuk kemerdekaan. Organisasi awal PPKI mencerminkan keterbatasan representasi geografis, dengan 21 anggota, yang sebagian besar berasal dari Jawa (Setialaksana, 2017). Namun, enam anggota tambahan dari luar Jawa, termasuk Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, direkrut oleh Soekarno setelah Proklamasi Kemerdekaan. Tindakan ini menunjukkan pengakuan terhadap nilai keberagaman dalam membangun legitimasi politik nasional (Aqimuddin, 2019). Legitimasi negara yang baru saja terbentuk dipengaruhi oleh peningkatan anggota PPKI dalam sejumlah cara, termasuk:

Pertama, dampaknya terhadap integrasi nasional dan representasi politik. Pilihan ini meningkatkan kredibilitas pemerintah Indonesia di mata rakyat di berbagai daerah dengan melibatkan perwakilan dari luar Jawa (Nabila et al., 2024). Menurut gagasan legitimasi politik, representasi yang lebih besar menurunkan kemungkinan separatisme, meningkatkan

stabilitas politik, dan menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif atas negara. Hal ini konsisten dengan gagasan bahwa dukungan yang luas dari rakyat diperlukan agar pemerintah memiliki legitimasi. Hal ini konsisten dengan penekanan Jean-Jacques Rousseau dalam *The Social Contract* bahwa legitimasi politik harus berasal dari *volonté générale*, atau keinginan umum, di mana pemerintah yang sah adalah pemerintah yang mencerminkan kepentingan warga negaranya secara keseluruhan (Michael T., 2016).

Yang kedua adalah dampak pada stabilitas pemerintahan awal dan legitimasi negara. Stabilitas pemerintahan awal Indonesia merdeka juga dipengaruhi oleh meningkatnya keanggotaan PPKI. Pemerintahan Soekarno-Hatta, yang menghadapi hambatan internal dan eksternal setelah kemerdekaan, memperoleh lebih banyak dukungan sebagai hasil dari langkah ini. Legitimasi yang lebih kuat akan memungkinkan pemerintah untuk menangani ancaman eksternal (seperti intervensi Belanda dan Sekutu setelah Perang Dunia II) dan internal (seperti perlawanan dari faksi pro-Belanda) terhadap kedaulatan dengan lebih baik (Aqimuddin, 2019).

Ancaman dari faksi-faksi politik dalam negeri dan organisasi-organisasi pro-Belanda merupakan salah satu kesulitan internal. Kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda atau mereka yang tidak sepenuhnya menerima kemerdekaan menjadi ancaman bagi pemerintahan Soekarno-Hatta di dalam negeri (Fearon, 1994). Namun, efektivitas pemerintahan baru tersebut dipertanyakan oleh sejumlah mantan pegawai pemerintah kolonial Belanda dan elit lokal. Potensi ketidakstabilan juga

disebabkan oleh perpecahan ideologis dalam kalangan nasionalis itu sendiri, seperti antara faksi-faksi yang mendukung demokrasi parlementer dan faksi-faksi lain yang lebih condong ke pemerintahan presidensial yang kuat.

Dengan meningkatkan keanggotaan PPKI, Soekarno dan Hatta mampu menyatukan kekuatan politik yang berbeda, menghindari disintegrasi, dan memastikan bahwa berbagai faksi merasa terlibat dalam pemerintahan baru. Dalam menghadapi ketidakstabilan, hal ini penting untuk mencegah perpecahan politik. Kendala eksternal termasuk kembalinya Belanda, yang berusaha merebut kembali wilayah mereka, dan intervensi Sekutu, khususnya dari Inggris. Kembalinya pemerintah Belanda melalui Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) dimungkinkan oleh Inggris, yang datang dengan kedok melucuti senjata pasukan Jepang (DRIEËNHUIZEN, 2024).

Untuk mendapatkan dukungan internasional dan menjamin bahwa perlawanan militer dan diplomasi dapat berjalan berdampingan dalam skenario ini, diperlukan pemerintahan yang kuat dan sah (Esoso & Ebye, 2024). Keikutsertaan anggota PPKI memperkuat klaim hukum pemerintah Soekarno-Hatta sebagai wakil sah rakyat Indonesia (Aqimuddin, 2019). Dalam menangani diskusi dengan pihak luar, terutama diplomasi dengan Inggris dan Belanda selama negosiasi awal yang akhirnya menghasilkan Perjanjian Linggarjati (1946), hal itu juga membantu menciptakan kohesi internal (van der Kroef, 1953).

Penambahan anggota PPKI memengaruhi dinamika politik jangka panjang Indonesia selain tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Pilihan ini menjadi model bagi proses membangun

konsensus dalam politik Indonesia, yang berkembang di bawah rezim Orde Baru dan mengarahkan demokrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarah politik Indonesia setelah tahun 1950-an, gagasan untuk mengakomodasi kekuatan politik yang berbeda memperkuat stabilitas tetapi juga membuka pintu bagi kompromi politik yang terkadang mengorbankan nilai-nilai demokrasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Untuk mencerminkan kompleksitas politik nasional Indonesia, anggota PPKI dipilih berdasarkan pertimbangan sosiologis, historis, dan ideologis. Menurut sosiologi, faktor utama yang memengaruhi upaya untuk menumbuhkan nasionalisme dan integrasi nasional adalah keragaman sosial dan etnis, representasi regional, dan dinamika kelompok dan kelas sosial. Penyesuaian struktur PPKI secara historis dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk iklim politik di bawah pendudukan Jepang, persiapan kemerdekaan, persaingan politik internal, dan tujuan untuk meningkatkan kedudukan Indonesia di mata internasional. Perluasan representasi dalam PPKI secara konseptual didasarkan pada nasionalisme Sukarno, Pancasila, demokrasi deliberatif, sosialisme Indonesia, dan pluralitas agama. Selain memperkuat legitimasi pemerintahan baru, langkah ini juga memperkaya pembahasan seputar pembentukan dasar negara. Alhasil, kebijakan yang muncul pun mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kohesi nasional serta menjadi lebih inklusif. Hasil ini menunjukkan bahwa arah politik dan pengembangan jati diri nasional di awal kemerdekaan Indonesia dipengaruhi oleh pilihan-pilihan strategis yang diambil

selama pembentukan lembaga-lembaga negara.

Saran

Realitas sejarah perubahan keanggotaan PPKI yang awalnya 21 diperbanyak menjadi 27 orang menunjukkan ketajaman politik, adaptasi strategis, dan kepemimpinan yang visioner. Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai saran yang sangat relevan dalam konteks kondisi berbangsa dan bernegara sekarang ini adalah:

1. Representasi politik yang inklusif. Pemerintah harus mempertimbangkan keragaman daerah, agama, dan etnis untuk meningkatkan kohesi sosial dan legitimasi politik. Keterlibatan delegasi dari luar Jawa membuktikan pentingnya representasi yang adil dalam pembuatan kebijakan nasional.
2. Adaptasi Konstelasi Politik Global. Kemampuan PPKI untuk menahan intervensi Jepang menunjukkan pentingnya pendekatan yang fleksibel dalam menangani situasi geopolitik. Demi kepentingan strategis negara, para pemimpin nasional harus waspada dan berhati-hati dalam menangani perubahan di dunia.
3. Prioritas Kepentingan Nasional. PPKI menunjukkan komitmennya untuk tetap independen di tengah tekanan eksternal. Dalam konteks ini, kebijakan terutama di bidang pendidikan, ekonomi, dan pertahanan harus difokuskan pada kepentingan bersama, bukan pada pragmatisme politik atau kepentingan kelompok tertentu.

4. Salah satu pilar kedaulatan adalah keberagaman. Sikap PPKI dalam menganut keberagaman menunjukkan pentingnya mengelola keberagaman sebagai modal sosial dalam rangka meningkatkan integrasi nasional. Upaya untuk menghilangkan politik identitas perlu diutamakan agar tidak terjadi disintegrasi sosial.
5. keberanian dalam mengambil keputusan strategis. Keberanian dalam bertindak ditunjukkan oleh tekad PPKI untuk memperjuangkan kemerdekaan meskipun Jepang kalah. Gagasan ini memerlukan kepemimpinan kreatif yang berpikiran maju dan berfokus pada kelangsungan pertumbuhan nasional dalam jangka panjang.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, B. R. O. G. (2001). *Bung Karno and The Fossilization of Soekarno's Thought**. 74(October 2002).
- Aqimuddin, E. A. (2019). *The Role of International Law in Indonesia; Case Study on BPUPK/PPKI Session 1945*. 13(1), 91–99. <http://unisep.lib.unishams.edu.my/xmlui/bitstream/handle/123456789/11914/91-99> - The Role of International Law in Indonesia- Case Study on BPUPK-PPKI Session 1945.pdf?isAllowed=y&sequence=1
- Arakawa, N., & Bader, L. R. (2022). Consensus development methods: Considerations for national and global frameworks and policy development. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 18(1), 2222–2229. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016>

- /j.sapharm.2021.06.024
- Asy'ari Muthhar, M. (2016). Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia. *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 49–72.
- Attribution-noncommercial-noderivatives, C. C., License, I., & By-nc-nd, C. C. (1949). *Chapter Title : The Politics of Independence in the Republik Indonesia and International Reactions , 1945-1949 Book Title : American Visions of the Netherlands East Indies / Indonesia Book Subtitle : US Foreign Policy and Indonesian Nationalism , 1920-194. 1945–1949.*
- Bahasa, J., & Budaya, D. A. N. (2023). *Perubahan Lafal Baku Dalam Bahasa Indonesia Akibat Dialek Daerah. 13(3), 47–53.*
- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7(1), 120–132.
- Dawa, M. D. L. (2009). Orang Tionghoa dalam Negara Indonesia yang Dibayangkan: Analisis Percakapan Para Pendiri Bangsa dalam Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 10(2), 259–284. <https://doi.org/10.36421/veritas.v10i2.215>
- DRIEËNHUIZEN, C. (2024). Repatriation as Means of Repair and Redress? *The Future of the Dutch Colonial Past*, 250–255. <https://doi.org/10.2307/jj.11895526.22>
- Duma Lumban Gaol, & Reka Seprina. (2023). Ketatanegaraan Indonesia Dibawah Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). *Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 3(1), 2829–5137. <https://doi.org/10.22437/krinok.v3i1.32084>
- Esoso, S., & Ebaye, N. (2024). *Coercive Diplomacy , Military Strategy and Foreign Policy Projections. 10(1), 23–37.*
- Fadhli, A., Zurwanty, R. H., & Sari, V. P. (2023). Konstruksi Pasal 33 UUD 1945 dalam Menangkal Pengaruh Sistem Kapitalisme di Indonesia. *Journal of Civic Education*, 6(1), 48–58. <https://doi.org/10.24036/jce.v6i1.974>
- Faisal, I. (2018). Religion, State, and Ideology in Indonesia: a Historical Account of the Acceptance of Pancasila As the Basis of Indonesian State. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 19–58. <https://doi.org/10.20885/ijjis.vol1.iss2.art2>
- Fauziyah, N., Susanto, H., & Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru, S. (2022). Prabayaksa: Journal of History Education. *Maret*, 2(1), 23–32.
- Fearon, J. D. (1994). Domestic Political Audiences and the Escalation of International Disputes. *American Political Science Review*, 88(3), 577–592. <https://doi.org/DOI:10.2307/2944796>
- Formichi, C. (Ed.). (2021). *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/cornell/9781501760433.001.0001>
- Gracela, L. E., Kaswati, A., & Jurahman, Y. B. (2023). Tjantrik: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah PENGARUH PENDUDUKAN JEPANG TERHADAP PERGERAKAN

- KEMERDEKAAN INDONESIA THE INFLUENCE OF JAPANESE OCCUPATION ON THE INDONESIAN INDEPENDENCE MOVEMENT. *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 2(1), 102–119.
- Gunawan, B. P., Yustianti, S., Lestari, S. E., Effendi, E., Poernomowatie, & Affand, M. (2020). The Implementation of Indonesia As the Rule of Law Based Constitution 1945 after Amendments. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(9), 818–827. <https://www.ijicc.net/index.php/volume-13-2020/194-vol-13-iss-9>
- Hasanah, U., & Aan Budianto. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Candi*, Vol. 20(No. 2), 31–54. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/44780/28324>
- Heri Rohayuningsih. (2009). Peranan Bpupki Dan Ppki Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. *Forum Ilmu Sosial*, 36(2), 184–194.
- Hindley, D. (1962). President Sukarno and the Communists: The Politics of Domestication. *American Political Science Review*, 56(4), 915–926. <https://doi.org/DOI: 10.2307/1952793>
- Indrayani, I., Umar, H., & Mellaz, A. (2020). Indonesia's Foreign Policy During Soekarno Era 1945-1965: (Orientation Shift from Diplomacy to Confrontation). *Journal of Social Political Sciences JSPS*, 1(3), 218–231.
- Islamiyah, D., Herwanto, H., Anggrayni, O. D., & Choiri, M. (2024). Pemahaman Dialek dan Variasi Bahasa di Indonesia melalui Kajian Literatur. *Journal of Linguistics and Social Studies*, 1(1), 33–43. <https://doi.org/10.52620/jls.v1i1.16>
- Jaya Zalukhu, S., Kaswati, A., & Abstrak, S. (2021). Soekarno Dan Perjuangannya Untuk Mencapai Kemerdekaan Indonesia Tahun 1927-1945. *RINONTJE: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 2(2), 63–71.
- Joko Purnomo, G., Purwana, D., & Anwar, C. (2023). Conceptual Problems of Political Parties Cadre Management in the Reform Era in Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 10(5), 305–322. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230538>
- Kingsbury, D. (2012). Indonesia. To nation by revolution: Indonesia in the twentieth century. By Anthony Reid. Singapore: NUS Press, 2011. Pp. 348. Maps, Plates, Glossary, Index. *Journal of Southeast Asian Studies*, 43(2), 374–375. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0022463412000148>
- Kuntowijoyo. (2003). Lari Dari Kenyataan: Raj, Priyayi, Dan Wong Cilik Biasa Di Kasunanan Surakarta, 1900-1915. *Humaniora*, 15(2), 200–211.
- Kusman, A. P. (2022). Kata kunci: Nasionalisme, Soekarno, Pancasila, Politik. 3(2), 65–79.
- Lay, C. (2006). Nasionalisme dan Negara Bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial & Politik*, 10(2), 165–180.
- Lindblad, J. T. (2021). The Dilemma of Knowledge Transfer in Early Independent Indonesia. *Lembaran Sejarah*, 17(1), 76. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.69969>
- Lockard, C. A. (2009). Fighting for the Cause of National Freedom, 1900—1950. In C. A. Lockard (Ed.), *Southeast Asia in World History* (p.

- 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195160758.003.0009>
- Lu, Y. (2024). Exploring the Paradox of Hope and Ambivalence in Short-lived Japanese Colonialism in Indonesia. *Transactions on Social Science, Education and Humanities Research*, 5, 426–431. <https://doi.org/10.62051/nba42308>
- Madjid, M. D. (2021). *Metode Sejarah Teori dan Paraktik*.
- Mat Yazid, M. N. (2016). Indonesian Relations with the Eastern Europe, Soviet Union and China before 1965: Systemic and Domestic Factors. *Review of European Studies*, 8(3), 253. <https://doi.org/10.5539/res.v8n3p253>
- Meliala, A. J., & Woods, J. A. (2022). The Synthesis of Indonesian Socialism According to The Constitution. *Constitutionale*, 3(2), 97–116. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2694>
- Meng, L. Y., & Silva, M. De. (2022). The Roots and Evolution of Nationalism in Indonesia. *Akademika*, 91(3), 93–104. <https://doi.org/10.17576/akad-2021-9103-08>
- Michael T. (2016). Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan. *Unisbank Semarang*, 531. <http://raimondfloralamandasa>.
- Nabila, P., Harnum, S., & Fahrizal Tanjung, M. (2024). Japanese Semi-Military Organizations in Indonesia: From Formation to the End of the Organizational Period. *Jurnal Nasional Holistic Science*, 4(1), 115–118. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- nation bulding.pdf*. (n.d.).
- Nefo, S., & Kertopati, H. (2025). *Perspektif Intelijen Sosial Budaya : Kewarganegaraan dan Bela Negara dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*. 4(1), 1029–1045.
- Niwandhono, P. (2014). *Gerakan Teosofi dan Pengaruhnya Terhadap Kaum Priyayi Nasionalis Jawa 1912-1926*. 11(1).
- Octavian, W. A., & Dianti, P. (2023). Nasionalisme dan Pancasila Perspektif Sukarno. *Journal on Education*, 5(3), 7553–7562. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1512>
- Paldi, Z. (2017). *Go Hungary - Go Indonesia: Understanding Culture and Society* (Issue September 2017).
- Pratama, F. F., Asyiah, A. K., & Chandra, D. (2022). Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Sukarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 49. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33301>
- Pulhehe, N., & Robandi, B. (2024). *Paradigma : Jurnal Kajian Budaya PANCASILA AS THE PHILOSOPHICAL FOUNDATION OF THE*. 14(3).
- Purwaningrum, P. W., & Pangestu, M. (2021). Variasi Dialek dalam Budaya Jawa Di Kabupaten Tangerang (Sebuah Kajian Dialektologi). *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(1), 9–15. <https://doi.org/10.15294/jsi.v10i1.44383>
- Razuni, G. (2023). BUNG KARNO'S POLITICAL THOUGHT ACCORDING TO PANCASILA: A Study of Bung Karno's Speech on June 1, 1945, and the President Soekarno/Bung Karno's Pancasila Course Throughout 1958-1959. *JWP*

- (*Jurnal Wacana Politik*), 8(2), 223.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.50119>
- Razuni, G. (2024). Critical Study On The Manipulation Of The History Of Pancasila's Birth In The New Order Version. *Journal of Governance*, 9(2).
<https://doi.org/10.31506/jog.v9i2.25402>
- Razuni, G., & Nasional, U. (2024). *Pancasila Democracy According to Sukarno ' s Thought and its Potential for Formulation a New Model of Indonesian Democracy*. 5(1), 98–111.
- Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2), 143.
<https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.16170>
- Riyanto, S., Febrian, F., & Zanibar, Z. (2022). Bhinneka Tunggal Ika: Its Norming and Actualization in Democracy in Indonesia. *Sasi*, 28(4), 567.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1058>
- Sartono, K. E. (2009). Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. *Humanika*, 9(1).
<https://doi.org/10.21831/hum.v9i1.3786>
- Setialaksana, N. (2017). Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Artefak*, 4(2), 109.
<https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.904>
- Sinaga, R., Joey, G., Sinurat, F., Aulia, T., & Khaterina, N. (2024). *Kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945*. 1(2), 379–388.
- Stutje, K. (2016). Behind the Banner of Unity: Nationalism and anticolonialism among Indonesian students in Europe, 1917-1931. *Behind the Banner of Unity*, 1–294.
<https://dare.uva.nl/search?identifier=4d135c1b-c4a6-4007-9678-35185ed73182>
- Suyanto, I. (2011). *SOEKARNO AND SUN YAT SEN Pendahuluan*. 55–70.
- Syarif, M. I. (2016). Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 15–32.
<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3568>
- van der Kroef, J. M. (1953). Dutch Policy and the Linggadjati Agreement, 1946-1947. *The Historian*, 15(2), 163–187.
<http://www.jstor.org/stable/24436182>
- Wirasena, A. F., Ardana, F. R., Nurmawati, N. A., & Fitriyono, R. A. (2023). Pancasila as the Ideology of the State and Nation. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(2), 215–221.
<https://doi.org/10.57235/jetish.v1i2.136>
- Yufriadi, F., Ramadhan Fitri, D., & Afifi, A. A. (2023). Pengaruh Nasionalisme Soekarno Terhadap Ketatanegaraan dan Politik Islam di Indonesia. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, 1, 39–51.
<https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.39>